

AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN INTEGRASI SOSIAL

Aini Mufidah
UIN Raden Intan Lampung
Mansur Hidayat
UIN Raden Intan Lampung
surhade@gmail.com

Abstract

This study describes a reality of relations and interactions between two groups of people based on religious and cultural differences. Awareness of the existing differences that could trigger conflict between the two groups, encourage the creation of local wisdom to adapting to culture and even adaptability to the pattern of applying respective religious teachings, so that the harmonious relations between the two different groups, could be established and became a supporting factor for establishing social, cultural and economic dynamics of both parties. This research was conducted using a qualitative approach, specially phenomenological approach. The results of the study explained that cultural ability in adapting and selecting of patterns in implementing cultural values and teaching and selecting the appropriate pattern of religious teachings, became a determinant factor in preventing conflict and maintaining harmony in the relation and interaction between two group of different communities.

Keyword : *plurality, conflict, cultural adaptation, social integration*

Abstrak

Studi ini membahas sebuah realitas hubungan dan interaksi yang terjadi antara dua kelompok masyarakat yang dilatarbelakangi perbedaan agama dan budaya. Kesadaran tentang adanya perbedaan diantara dua kelompok mendorong timbulnya kreatifitas menciptakan kearifan lokal untuk bisa melakukan adaptasi budaya (melakukan penyesuaian diri dalam tindakan dan prilaku dengan budaya) dan mencari pola pelaksanaan ajaran agama yang ada, sehingga harmonitas hubungan antara dua kelompok masyarakat yang berbeda bisa diwujudkan dan bahkan bisa menjadi factor pendorong

dinamika sosial, budaya dan ekonomi kedua kelompok masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Khususnya pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan alamiah dalam melakukan adaptasi budaya dan melakukan seleksi pola-pola implementasi nilai-nilai dan ajaran agama yang relevan, menjadi factor determinan dalam mencegah konflik dan menjaga keharmonisan hubungan dan interaksi antara dua kelompok masyarakat yang berbeda.

Kata Kunci : *Pluralitas, konflik, adaptasi budaya, integrasi sosial*

PENDAHULUAN

Menurut Maurice Duverger langkah kunci menuju terwujudnya integrasi masyarakat (majemuk) adalah membangun interdependensi yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama¹. Tentu saja membangun interdependensi sebagaimana disyaratkan oleh Maurice diatas, akan berhadapan dengan sejumlah realitas objektif yang bisa menjadi kendala sekaligus sebagai faktor fungsional. Dalam masyarakat plural, pada saat tertentu terjadi kompetisi, kesalah pahaman (*miss understanding*), dan benturan kepentingan yang memicu konflik. Interaksi antar kelompok-kelompok dalam masyarakat, pada saat tertentu mengakibatkan terjadinya persinggungan antara kepentingan, tujuan dan persepsi sehingga tidak jarang berbuntut timbulnya gesekan (*friction*). Gesekan-gesekan kepentingan, kalau tidak dikelola secara baik, maka akan berkembang menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) yang tidak jarang berbentuk tindakan *kekerasan (violence action)*². Konflik sosial yang dilatarbelakangi perbedaan etnis dan budaya menjadi realitas yang banyak terjadi, terutama dikalangan masyarakat yang berlatarbelakang budaya yang majemuk. Di propinsi Lampung yang memang terdiri dari beragam suku dan etnis, konflik dan benturan antar etnik beberapa kali terjadi. Peristiwa konflik antar masyarakat suku Bali dan suku Lampung di Kampung Bali Nuraga adalah sebuah kejadian yang menjadi catatan sejarah penting. Peristiwa ini tercatat sebagai peristiwa konflik yang besar, disamping karena dampak

¹Suwarno, dkk, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung), h. 132.

²Mansur Hidayat, *Manajemen & Resolusi Konflik*, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden intan, 2013), hlm 9

sosial, ekonomi dan budaya yang ditimbulkannya juga karena efek sosial budaya yang luas. Konflik dalam interaksi sosial juga bisa terjadi dalam keragaman budaya, agama bahkan mazhab-mazhab agama dan pemikiran. Konflik sosial telah menjadi bagian integral konstruksi sosial yang dibangun oleh pluralitas (keragaman) kelompok etnik, budaya, agama, faham dan mazhab ideologi dan politik, dan lain-lain³

Dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia kemajemukan adalah sebuah realitas yang menjadi kekuatan sekaligus menyimpan kerawanan sosial. Dalam sebuah survey kerjasama BPS dan *Institute of Asian Studies* (ISEAS) sebagai mana dilansir dalam situs BPS pusat, terdapat 633 suku besar di Indonesia⁴. Sebagian dari suku-suku yang ada di Indonesia menyebar dan berkembang di sebagian besar wilayah Indonesia; seperti suku Jawa, Sunda, Bali dan lainnya, namun sebagian lainnya hanya berkembang di wilayah yang terbatas. Suku atau etnik Jawa dan Bali misalnya, tersebar di banyak tempat (Pulau) di Indonesia, termasuk di pulau Sumatera khususnya di Provinsi Lampung. Keberadaan suku (etnis) Jawa dan Bali menyebar di banyak daerah di Sumatera, khususnya di daerah-daerah di provinsi Lampung. Meskipun secara etnis, suku Jawa di Lampung menempati posisi sebagai etnis mayoritas. Demikian juga halnya dengan suku Bali, jumlah suku Bali di Lampung yang terus berkembang antara lain juga bisa ditangkap dari data jumlah penganut agama Hindu yang menempati posisi nomor dua setelah penganut Islam.

Keragaman dan perbedaan etnis, sebagaimana dijelaskan diatas, disamping akan memperkaya referensi sosial dalam interaksi dengan sesama, juga menyimpan kerawanan sosial berupa konflik. Keragaman etnik yang berimplikasi kepada keragaman budaya, akan membawa implikasi gesekan-gesekan, perselisihan dan sengketa antar etnik, ketika ekspresi budaya masing-masing etnik itu bersinggungan dengan ekspresi budaya etnik atau kelompok lain yang berbeda budaya. Apalagi jika perbedaan yang ada berkelindan dengan perbedaan kepentingan yang mendasari perjuangan masing-masing. Ketika perbedaan itu dijadikan sebagai simbol untuk memenangkan persaingan kepentingan, maka pada saat itu konflik, baik dalam wujudnya yang tersembunyi (*latent conflict*) bahkan menjadi yang sudah menjelma dalam kenyataan (*manifest*) menjadi sulit untuk dihindari. Pemicu konflik dalam konteks ini bukan ekspresi budaya etniknya, namun lebih kepada kepentingan individual maupun kelompok etnik yang saling

³*Ibid*, h. 13.

⁴BPS, *Mengulik Data Suku Indonesia*, tersedia di <http://www.BPS.go.id>, hal 1 diakses pada tgl. 10 Oktober 2016

berbenturan antara satu dengan yang lainnya.⁵ Kelompok-kelompok sosial yang memiliki latar belakang etnik dan budaya yang berbeda, yang tidak disertai dengan kesadaran pluralitas-budaya, bisa jadi akan melihat kelompok lain dengan berfokus pada perbedaan yang ada. Perbedaan pola yang dimiliki oleh orang dari kebudayaan lain seringkali dianggap menjadi suatu keanehan atau kejanggalan. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya sikap *stereotype* ataupun etnosentrik yang menganggap bahwa kebudayaan 'kita' adalah yang paling benar, paling baik, dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang bukan sekedar berbeda, bahkan harus ditaklukkan. Sikap ini sangat fatal karena dapat menimbulkan konflik.

Secara empiris konflik antar etnik adalah bagian dari realitas sosio-historis yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat majemuk. Konflik antar etnik terjadi dalam beragam konteks, mulai dari konteks pribadi atau personal, komunitas, komunal, regional, dalam negara sendiri hingga antar negara. Beragam konteks itu menjadi sumber konflik karena ketidak setaraan atau perbedaan disposisi, persepsi, orientasi nilai, sikap, dan tindakan dalam merespons situasi sosial, historis, kesadaran sosial, ekonomi, ideologi, politik, bahkan situasi yang berkaitan dengan kejadian-kejadian mutakhir konflik antaretnik⁶.

Hingga sekarang sikap seperti itu masih sering ditemukan, bahkan dalam relasi atau hubungan antar negara (*inter-state conflict*). Hubungan antar kelompok yang berbeda tidak jarang diwarnai dengan hubungan yang bersifat konflik berupa kerusuhan, tawuran, perkelahian, dan lain sebagainya. Banyak peristiwa konflik yang terjadi hanya karena kesalahpahaman antar budaya. Kesalahan dalam memahami simbol-simbol budaya yang tersampaikan dalam pesan-pesan yang ditangkap dalam komunikasi antar budaya, kerap diwarnai kesalah pahaman yang menimbulkan konflik. Simbol-simbol yang disampaikan kerap difahami dalam bingkai pemahaman yang berbeda, sehingga menimbulkan sikap yang kontra produktif. Perbedaan ras dan agama dalam kasus tertentu malah memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku, ras dan agama menjadi menjadi faktor perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi tidak bisa terlepas dari perbedaan budaya dan kepentingan yang dilatar belakangi oleh perbedaan.

Masyarakat Lampung adalah masyarakat yang majemuk, sehingga beberapa peristiwa konflik yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari realitas kemajemukan yang ada. Peristiwa konflik di Desa Balinuraga yang

⁵ Mansyur Hidayat, *Manajemen & Resolusi Konflik*, (Bandar Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden intan, 2013), hlm .2.

⁶ Alo Liliwery,

ada di Lampung Selatan, meski berawal dari peristiwa sangat sederhana dan *sepele*, namun karena dikaitkan dengan perbedaan identitas budaya dan agama, menjadikan konflik sederhana berkembang menjadi konflik sosial yang serius, yang memakan korban jiwa, kerusakan sarana fisik dan menyisakan trauma psiko-sosiologis.

Konflik yang termanifestasi dalam realitas sosio-historis, disatu sisi membawa dampak buruk bagi proses pembangunan. Proses pembangunan yang merupakan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa dalam berbagai dimensi, akan mengalami interupsi dan pelambatan akibat dampak buruk yang ditimbulkan oleh konflik. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk membangun integrasi sosial adalah keniscayaan. Keragaman etnis dan budaya yang ada, juga harus ditempatkan sebagai kekayaan potensi budaya lokal yang bisa menjadi kekuatan dalam membangun kearifan dalam menyikapi perbedaan.

Kearifan lokal realitasnya menjadi sisi lain dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh masing-masing kelompok etnis, kelompok budaya dan agama. Budaya dan agama kenyataannya juga mengandung ajaran-ajaran tentang norma-norma sosial yang menjadi pedoman bagi penganutnya dalam bertindak dan berperilaku, dalam berhubungan dengan sesama maupun dengan orang-orang yang berbeda. Dalam interaksi antar individu dan kelompok, kearifan-kearifan yang dibentuk oleh ajaran-ajaran agama dan budaya beroperasi membentuk sikap dan perilaku individu dan kelompok yang produktif dan kondusif dalam membangun kebersamaan ditengah kemajemukan.⁷

Artikel ini mendiskusikan bagaimana kearifan lokal yang dimiliki oleh dua kelompok masyarakat beroperasi secara fungsional dalam membentuk sikap dan perilaku sosial dua kelompok masyarakat yang berbeda. Objek kajian dari tulisan ini adalah kelompok masyarakat Bali dan suku Jawa di Kampung Rama Utama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang hidup secara berdampingan tanpa konflik yang berarti. Dalam *survey* peneliti, beberapa rumah masyarakat Bali berada di tengah-tengah rumah masyarakat Jawa. Interaksi sosial yang ada di Kampung Rama Utama berlangsung harmonis, hal ini dilihat dari acara *ngaben* (prosesi pembakaran mayat pada masyarakat Bali) serta dalam acara ulang tahun kampung, mereka berkumpul dan menyatu. Kedua suku yang berbeda ini saling menghormati dan bertoleransi. Mereka hidup berdampingan dalam satu wilayah. Fakta diatas menarik untuk diteliti dan didiskusikan secara mendalam, bagaimana kedua suku yang berbeda dengan pandangan hidup yang berbeda pula, dapat

⁷Aprilia theresia, et. Al. *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta,2014), h. 72.

hidup berdampingan dan dapat meminimalisir konflik-konflik yang ada. Asumsi yang dibangun adalah bahwa ada pedoman atau prinsip (sistem nilai dan norma) yang sama yang dianut kedua suku tersebut untuk menciptakan kerukunan antar keduanya. Kedua suku yang berbeda itu mengimplementasikan system nilai dan norma yang dianut itu dengan semangat 'kearifan lokal'.

PEMBAHASAN

Sekilas tentang Integrasi Sosial, Plurlitas Budaya

Integrasi sosial dapat diartikan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan sehingga menghasilkan persenyawaan-persenyawaan berupa adanya konsensus nilai-nilai yang sama-sama dijunjung tinggi. Dalam hal ini terjadi akomodasi, asimilasi dan berkurangnya prasangka-prasangka di antara anggota masyarakat secara keseluruhan.⁸ Integrasi sosial juga diartikan sebagai ikatan sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan memberi tuntunan tentang bagaimana individu berperilaku. Integrasi berhasil apabila mencakup hal-hal sebagai berikut:⁹ Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Tercapai semacam konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. Norma-norma cukup lama konsisten dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur terpenting dalam pengintegrasian dan solidaritas kelompok antara lain adalah kemargaan, perkawinan, persamaan agama, persamaan bahasa dan adat, kesamaan tanah, wilayah, tanggung jawab atas pekerjaan, tanggung jawab dalam mempertahankan eksistensi, ekonomi, ikatan lembaga yang sama, pertahanan bersama, kerjasama atau bantuan bersama, dan pengalaman, tindakan dan kehidupan bersama.¹⁰ Dalam sosiologi, integrasisosial berarti proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Dengan demikian, ada dua unsur pokok integrasi sosial. Unsur *pertama* adalah pembauran atau penyesuaian, sedangkan unsur *kedua* adalah unsur fungsional. Jika kemajemukan sosial gagal mencapai pembauran atau penyesuaian satu sama lain, maka kemajemukan sosial berarti

⁸Ibid, h. 292.

⁹Suwarno, dkk, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung), h. 132.

¹⁰Suminar, MA dkk, *Integrasi dan Disintegrasi Dalam Prespektif Budaya*, (Jakarta), h. 3-4.

disintegrasikan sosial. Dengan kata lain, kemajemukan gagal membentuk (disfungsional) masyarakat.¹¹

Secara operasional integrasi sosial adalah suatu proses penyatuan antara dua unsur atau lebih yang mengakibatkan terciptanya suatu keinginan yang berjalan dengan baik dan benar. Lebih lanjut integrasi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat sebagai sebuah sistem dengan saling menghargai budaya masing-masing. Sedangkan pengembangan integrasi sosial adalah suatu proses yang bergerak secara dinamis, usaha-usaha yang terus menerus dalam menyadarkan dan membina masyarakat agar terwujudnya kerukunan antar etnis, agama, maupun budaya melalui peng-integrasian kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh kedua etnis, agama, maupun budaya yang berbeda. Integrasi masyarakat akan terwujud apabila mampu mengendalikan prasangka yang ada di masyarakat sehingga tidak terjadi konflik, dominasi, tidak banyak sistem yang tidak saling melengkapi, dan tumbuh integrasi tanpa paksaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan integrasi masyarakat pada masyarakat majemuk dilakukan dengan mengatasi dan mengurangi prasangka.¹²

Indonesia sebagai masyarakat majemuk mencerminkan adanya keragaman sistem nilai budaya yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial. Kemajemukan tersebut dalam bidang agama, suku, maupun budaya. Masing-masing penganut sistem nilai cenderung kurang loyal terhadap sistem nilai secara keseluruhan, bahkan kurang memiliki kesadaran untuk memahami satu sama lain. Maurice Duverger mengatakan dalam langkah perkembangan menuju integrasi itu merupakan suatu usaha untuk membangun interdependensi yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat, sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.¹³ Integrasi sosial artinya membuat masyarakat menjadi satu keseluruhan yang bulat. Kegiatan integrasi dapat digunakan pada masyarakat mikro (misal:keluarga), meso (misal: organisasi), makro (misal: bangsa).¹⁴

Terjadinya integrasi tergantung pada besarnya keinginan dan kesadaran sebagian besar anggota kelompok untuk bersama-sama menyesuaikan diri

¹¹Eka Hendry Ar, dkk, “ *Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik*”.Vol.21 No.1 (Mei 2013),h.195.

¹²Koentjaraningrat, *Sejarah antropologi I*, universitas Indonesia (UI-Press), h.292.

¹³Suwarno,dkk,*Op.Cit.*h.128

¹⁴Hendro Puspito,*Sosiologi Sistematis* (Yogyakarta:Penerbit KANISIUS (Anggota IKAPI), 1989), h.375.

dalam keanekaragaman paham dan tujuan-tujuan kelompok. Dengan terjadinya keseimbangan perbedaan paham dapat menumbuhkan solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok. Solidaritas merupakan unsur pemersatu kemajemukan ke dalam satu keseluruhan. Seperti persatuan warga negara Indonesia yang terdiri dari keragaman adat budayanya terikat menjadi satu. Dalam prinsip persahabatan: mengandung persatuan, tetapi persatuan belum tentu mengandung persahabatan. Dengan demikian, Kesatuan sama dengan persahabatan, karena sifatnya sama-sama integrasi (Durkheim: sama-sama keseluruhan). Durkheim berpendapat bahwa kumpulan orang merupakan integrasi sosial yang syarat utamanya adalah solidaritas sosial.¹⁵

Durkheim mengemukakan konsep solidaritas sosial, menurut pandangannya solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan modal dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa ini mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat /derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu.¹⁶ Dalam konteks ini Max Weber juga menekankan pentingnya memahami (*verstehen*) terhadap tindakan orang lain. Menurutnya, suatu tindakan yang dilakukan seseorang bersifat sosial apabila diperhitungkan oleh orang lain dalam masyarakat. Weber percaya bahwa penjelasan tentang tindakan sosial dibutuhkan untuk memahami makna-makna dan motif-motif yang mendasari perilaku manusia. Menurut Haralombos, seseorang harus menginterpretasikan makna-makna tindakan dari orang yang bersangkutan.¹⁷

Nilai solidaritas dan sentimen masyarakat pedesaan dianggap dapat memberikan kehidupan tentram dan damai. Inilah sebabnya mengapa kepercayaan terhadap tokoh sakti dan cerita tradisional begitu mudah diterima oleh masyarakat pedesaan. Dengan kata lain, bentuk dan corak kehidupan masa lampau menjadi bagian kesadaran sosial masyarakat pedesaan.¹⁸ Menurut Koentjaraningrat bagi masyarakat pedesaan, nilai solidaritas merupakan kebutuhan umum yang dinilai lebih tinggi daripada kebutuhan individu. Koentjaraningrat juga menyebutkan bahwa solidaritas terwujud dalam bentuk bekerja bakti untuk umum, gotong royong, yang

¹⁵Suwarno,dkk,*Op.Cit.*h.129.

¹⁶Doyle Paul Johnson,*Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, PT Gramedia Jakarta, h. 181.

¹⁷Sindung Hariyanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Modern*, Arr-ruz Media, h.

¹⁸Eka Hendry,dkk,*Op.Cit.*h.198.

dianggap suatu hal yang sangat terpuji dalam sistem hukum pedesaan. Demikian pula bahwa hak-hak individu tidak secara jelas dan tajam untuk diutamakan.¹⁹

Integrasi (mengalami perkembangan) atau meningkat, jika anggota kelompok bersedia untuk berkoordinasi, bekerjasama, komunikasi bersama, dan tindakan berama memelihara solidaritas dalam waktu yang relatif lama. Ogburn dan Nimkoff menyatakan bahwa proses integrasi adalah bukan suatu proses yang dapat berjalan dengan cepat. Suatu integrasi lebih merupakan suatu ikatan berdasarkan norma, yaitu karena norma kelompoklah yang merupakan unsur yang mengatur tingkh laku, dengan mengadakan tuntutan tentang bagaimana orang harus bertingkah laku.²⁰ Integrasi akan berhasil jika: a. nggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain, b. Apabila tercapainya konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial, c. Apabila norma-norma berlaku cukup lama, tetap (*consisten*), tidak berubah- ubah.

Secara umum syarat-syarat terjadinya integrasi adalah sebagai berikut: *pertama*, Adanya penyesuaian faham tentang norma-norma dan nilai-nilai yang baru tercipta, kehidupan dalam kelompok stabil dan para anggotanya nyaman tinggal didalamnya. Telah ada kesepakatan bersama sebelumnya tentang cara bersikap dan bertindak dan cara mencapai tujuan pribadi dan tujuan kelompok. *Kedua*, Norma-norma sosial yang berlaku cukup konsisten dan diakui oleh sebageian besar anggota kelompok. Norma- norma sosial dianggap dapat membantu usaha mewujudkan tujuan-tujuan pribadi dan kelompok. *Ketiga*, Sanksi-sanksi sosial yang berlaku diterapkan dengan tegas terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan atau melanggar peraturan yang telah disepakati bersama. *Keempat*, Persaingan semakin berkurang, karena sanksi sosial yang berlaku lebih kuat daripada kehendak subjektik individu dan golongan untuk melakukan penyimpangan.

Dalam proses integrasi masyarakat, apabila syarat-syarat integrasi tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi *disintegrasi*, yakni pecahnya kesatuan. Unsur-unsur penghambat proses integrasi sosial adalah sebagai berikut:²¹*pertama*, Unsur Darah: Unsur ini menjelma dalam ras dan suku. Suatu ras merasa memiliki darah berkualitas tinggi sehingga mau berdiri di atas segala ras di dunia ini, dan mau menguasai bangsa-bangsa lain. *Kedua*, Unsur Kebudayaan: Unsur ini juga telah menciptakan ilusi kesombongan dalam bangsa dan suku yang menilai dirinya memiliki kebudayaan yang lebih maju. Akibatnya terasa pula, yakni bahwa kerja sama antar suku-suku dalam

¹⁹Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1967).

²⁰Suwarno,dkk,*Op.Cit.*h.131.

²¹Hendro Puspito, *Op.Cit.* h. 392-395.

satu negara tidak lancar. Hal ini menghambat terwujudnya kesatuan (integrasi) karena munculnya polarisasi-polarisasi yang saling menjauhkan. *Ketiga*, Unsur Agama: dari pengamatan kasar dan pengalaman umum diketahui bahwa agama merupakan satu hal yang sensitif dan oleh karenanya sering menghambat integrasi sosial maupun nasional. Berkaitan dengan masalah agama dan integrasi sosial, beberapa hal yang perlu dicatat, yakni: *pertama*, dalam masyarakat yang mendambakan integrasi didapati berbagai macam-macam agama yang mempunyai doktrin yang berbeda. *Kedua*, masing-masing agama berkeyakinan dan berusaha meyakinkan orang bahwa agama tersebut adalah agama yang paling benar dan menganggap agama lain salah. *Ketiga*, Unsur Daerah atau tanah dan Daerahisme: daerah dan daerahisme tidak dapat dipisahkan dari penduduknya. Daerahisme menjadi unsur penghambat integrasi jikalau penduduknya terdiri dari orang-orang dari suku yang sama dan berjumlah besar. Tingkat kerawanan daerahisme bertambah apabila suku itu menganut satu agama yang sama, memiliki sumber ekonomi yang kuat, dan merasa memberikan sumbangan yang besar, tetapi tidak memiliki imbalan yang setimpal. Rasa tidak puas biasanya menjurus keusaha-usaha yang mengganggu keamanan, bahkan meningkat menjadi gerakan yang sparatis.

Dengan demikian integrasi sosial (masyarakat) akan terwujud apabila mampu mengendalikan prasangka yang ada di masyarakat sehingga tidak terjadi konflik, dominasi, tidak banyak sistem yang tidak saling melengkapi, dan tumbuh integrasi tanpa paksaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan integrasi masyarakat pada masyarakat majemuk dilakukan dengan mengatasi atau mengurangi prasangka.²²

Masyarakat mejemuk menurut Furnivall adalah masyarakat yang bisa hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial budaya, mereka terpisah dan tidak tergabung dalam suatu unit politik. Sebab langgengnya kemajemukan itu ialah faktor ekonomi. Kepentingan ekonomi suatu kelompok yang menyebabkan kelompok tersebut menguatkannya dengan faktor-faktor primordial lainnya, seperti agama, etnik, bahasa, dan pola tiggah laku. Young mengajukan 3 (tiga) komponen dasar yang dapat dirujuk untuk suatu masyarakat yang majemuk, yaitu: (a) kaitanya dengan pembagian kekuasaan politik dan pengaturan territorial sebagai tempat/wilayah asal pemukiman kelompok, (b) agregasi pengelompokan dapat dibedakan, baik dari sistem budaya maupun politik, dan (c) dasar solidaritas pengelompokan adalah kebersamaan komunal, persaudaraan atas hubungan darah dan perkawinan, bahasa, ras, etnis, dan adat kebiasaan (*custom*). Furnivall mengajukan contoh klasik dalam studinya, yaitu

²²Abu Hamadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: PT Adi Mahasatya, 2003), h.292.

masyarakat *Nederland Indie* (Indonesia) tahun 1940. Dalam studinya itu, dia memperlihatkan gambaran masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang menarik. Masyarakat Indonesia di masa kolonial diperintahkan oleh kelompok ras yang berbeda. Penduduk asli, menurut Furnivall, terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang secara sosial, politik dan ekonomi terpisah. Ratusan kelompok-kelompok etnis itu hidup dalam kawan territorial tersendiri dengan bahasa dan sistem-sosial budaya yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lain serta tersebar di kepulauan *Nederland-Indie* (Indonesia) yang begitu luas.²³

Dalam masyarakat yang majemuk, terjadinya pertikaian atau pertentangan dalam hubungan atau interaksi adalah mungkin, bahwa segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan-kesatuan sosial yang terikat dalam ikatan-ikatan primordial dengan kebudayaan yang berbeda satu sama lain, mudah sekali menimbulkan konflik-konflik di antara kesatuan-kesatuan sosial tersebut. Menurut Koentjaraningrat, ahwa sumber-sumber untuk bertikai atau bertentangan antara suku-bangsa atau golongan pada umumnya dalam negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ada paling sedikit lima macam:²⁴*Pertama*, Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama. *Kedua*, Konflik bisa terjadi kalau warga dari satu suku-bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaan kepada warga dari suatu suku bangsa lain. *Ketiga*, Konflik yang sama dasarnya tetapi lebih fanatik dalam wujudnya bisa terjadi kalau dari satu bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep agamanya terhadap warga dari suku-bangsa yang lain yang berbeda agama. Konflik terang akan terjadi kalau satu suku-bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis. Potensi konflik terpendam ada dalam hubungan antara suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat.

Koentjaraningrat menunjukkan bahwa ada dua potensi untuk dapat saling bekerjasama, yaitu: *Pertama*, warga dari dua suku bangsa yang berbeda dapat saling bekerjasama secara sosial ekonomi, kalau mereka masing-masing bisa mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang berbeda-beda saling lengkap-melengkapi. Dalam keadaan saling membutuhkan itu, akan berkembang suatu hubungan yang dalam ilmu antropologi disebut simbiotik. Dalam hal ini sikap warga dari suatu suku bangsa terhadap yang lain dijiwai oleh suasana toleransi. *Kedua*, warga dari suku bangsa yang berbeda juga dapat hidup berdampingan tanpa konflik, kalau ada konflik maka orientasi ke

²³*Ibid.* h,46.

²⁴ Soleman B. Taneko, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: CV Fajar Agung, 1994), h.88-89.

arah suatu golongan ke tiga, yang dapat menetralisasi hubungan anantara kedua suku tersebut.²⁵

Pengertian Dan Urgensi Kearifan Lokal

Jauh sebelum era kemerdekaan, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem sosial-budaya yang sangat khas, yang berbeda-beda antara satu etnis dengan etnis lainnya. Sistem-sosial budaya ini memuat nilai-nilai luhur dan norma-norma yang dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh masyarakat bersangkutan. Setiap komunikasi lokal yang terdapat di Nusantara mempunyai sistem nilai dan norma tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga tercipta suatu pola kehidupan mekanistik dalam masyarakat. Sistem nilai dan norma itu biasanya mendorong interaksi sosial yang intens, perasaan kebersamaan, kerjasama, dan kedamaian. Ini semua merupakan suatu kearifan lokal yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Sistem sosial-budaya tersebut telah tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi, seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya, tanpa ada ilmu atau teknologi yang mendasarinya. Tidak ada pendidikan atau pelatihan untuk meneruskan keahlian. Kearifan lokal tersebut terpelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini Boleh jadi ia merupakan sintesa budaya, agama, semangat modernisasi yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang. setiap sistem sosial-budaya yang terwujud dari kontrak sosial tersebut.

Kearifan Lokal dalam mengembangkan integrasi sosial pada masyarakat Rama Utama

Secara historis kampung Rama Utama adalah tanah kampung warga keturunan para transmigran yang majemuk. Kampung ini dihuni oleh etnis Bali dan masyarakat ber-etnis Jawa yang sekaligus disertai dengan keragaman agama yang di anut oleh masyarakat setempat. Dari data demografi desa memang nampak bahwa masyarakat yang ber-etnis Jawa merupakan mayoritas dari penduduk desa (3,759 jiwa dari etnis atau suku Jawa dan Suku Bali berjumlah 150 jiwa). Meskipun beragam dari sisi etnis, budaya dan agama namun terdapat kesepakatan bersama masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kampung Rama Utama yang aman, sejahtera, maju dan tertib administrasi dengan suasana religius”.²⁶ Komitmen historis ini juga yang selalu dipegang teguh oleh aparat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, menjaga desa dari segala bentuk tindakan yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat desa, menekan potensi kriminalitas, sehingga kenyataannya kampung Rama Utama ini aman dari

²⁵*Ibid*, h. 90.

²⁶Gimo, Kepala Kampung, *Wawancara*, 14 januari 2017.

permasalahan kriminalitas, dan paling tidak, tidak pernah timbul permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan agama maupun suku.²⁷

Masing-masing kelompok etnis memiliki kebebasan untuk hidup dengan mengekspresikan sikap, prilaku dan tindakan yang didasari oleh ajaran adat istiadat dan budaya etnisnya, dengan tetap berkomitmen untuk menjaga kebersamaan dalam interaksi dengan suku yang lain yang ada di desa. Masyarakat etnis Bali adalah masyarakat yang selalu memegang komitmen dan selalu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam upaya menjaga kebersamaan dan menghindari riak-riak perselisihan dengan suku lain maka masyarakat etnis Bali antara lain selalu memegang komitmen untuk menghayati dan menerapkan ajaran “*Tri Khaya Parasuda*” yang artinya tiga jalan hidup dalam masyarakat Bali. *Tri Khaya Parasuda* yang mengandung arti tiga jalan hidup terdiri dari *pertama*, *Manachika*, yang artinya berfikir yang jernih, *Wachika*, yang artinya berkata yang baik, *Kayikha*, yang artinya berbuat baik. Ketiga unsur tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama masyarakat Bali maupun dengan masyarakat lain.²⁸

Falsafah sosial masyarakat Bali ini menjadi pedoman dan tuntunan bagi masyarakat etnis Bali dalam pergaulan, baik dengan sesama masyarakat etnis Bali yang menganut falsafah ini, maupun masyarakat yang berlainan etnis. Seperti pernyataan Ketut Sutayana bahwa falsafah dan norma sosial ini diterapkan oleh masyarakat etnis Bali didesa ini dalam kehidupan sehari-hari, bersifat universal pada umat manapun dan dimanapun, utamanya dalam skope pergaulan di desa ini agar terhindar dari perselisihan dan masalah dalam pergaulan, terutama sesama warga kampung Rama Utama yang majemuk. Hal ini yang menjadi dorongan bagi masyarakat Bali di desa ini untuk menjaga toleransi antar suku ataupun antar umat beragama. Pada hari raya Idul Fitri (hari raya umat muslim), etnis Bali (yang Hindu) tak segan untuk mengunjungi dan ikut menampakkan kegembiraan dihadapan orang Jawa yang muslim.²⁹ Sikap dan prilaku sosial masyarakat Bali di desa ini tidak sekedar bentuk adaptasi yang dilatari oleh motif pragmatis, sekedar untuk bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat majemuk yang ada. Sikap sosial yang diekspresikan dalam interaksi dengan sesama secara substantif merupakan dorongan dan falsafah budaya yang menyatu dalam ideologi agama Hindu yang dianut. Sehingga bagi masyarakat etnis Bali yang notabene penganut Hindu, sulit memisahkan antara agama Hindu dan Budaya Bali. Budaya Bali dan agama Hindu yang dianut menjadi ikatan sosio-budaya,

²⁷Gimo, Kepala Kampung, *Wawancara*, 14 januari 2017

²⁸I Ketut Sutayana, Pinandhite (Pemangku Agama Bali), *Wawancara*, 15 Januari 2017.

²⁹I Ketut Sutayana, Pinandhite (Pemangku Agama Bali), *Wawancara*, 15 Januari 2017.

yang membentuk sikap dan perilaku sosial masyarakat, dalam berhubungan (berinteraksi) dengan sesama maupun lintas etnik.

Dalam interaksi sosial dengan sesama warga desa, masyarakat etnis Bali juga menerapkan Falsafah persaudaraan dalam budaya Bali yang disebut *Menyama Braya*. *Menyama* yang artinya saudara, dan *Braya* artinya adalah tetangga. Falsafah dan norma sosial ini menuntun penganutnya (orang Bali) terutama untuk saling menghormati walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, dan saling bertoleransi. Kita harus saling berkawan baik dengan tetangga jangan saling menyakiti.³⁰ Seperti juga dijelaskan oleh I Ketut Susun bahwa *Menyama Braya* adalah pedoman hidup yang selalu diajarkan oleh pemangku agama orang Bali. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kita harus saling menjaga, hormat-menghormati, walaupun kita beda agama beda suku, tapi kita wajib untuk bertoleransi.³¹

Masyarakat suku Bali menempatkan norma-norma budaya Bali yang mereka anut, yang menyatu dengan agama Hindu-Bali yang dianut sebagai pedoman dan norma kehidupan yang mengikat. Norma sosial yang bersumber dari Nilai-nilai budaya Bali ini diyakini kebenarannya, sehingga menuntut komitmen semua penganutnya untuk mengejawantahkannya dalam praksis kehidupan orang Bali disini. Keyakinan tentang kebenaran falsafah sosial ini, seperti dinyatakan oleh salah seorang informan bahwa falsafah *Menyama Braya* ini intinya sama dengan ajaran agama lain, baik itu Islam atau agama yang lain, satu tujuan mencari kebaikan tapi jalannya yang berbeda-beda. Seperti orang Bali bilang “*Ide sang yang widi*”, sedangkan orang Islam menyebut dengan “*Allahu Akbar*”, tapi tujuannya satu yaitu mencari kebaikan sesuai dengan ajaran yang diyakini.³²

Masyarakat Jawa yang menjadi bagian terbesar (mayoritas) dari kampung Rama Utama juga terikat dan merasa berkewajiban untuk memegang teguh ajaran leluhur Jawa dalam segala gerak gerik dalam menjalani kehidupan. Menjadi orang Jawa bagi masyarakat Jawa di kampung ini adalah kebanggaan, setiap orang Jawa harus menghayati, memahami dan mengamalkan tuntunan falsafah dan norma sosial yang diajarkan oleh para leluhur. Menjadi orang Jawa harus selalu *Njawani*. Terminologi ini difahami masyarakat Jawa di tempat ini sebagai tuntutan untuk selalu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan falsafah hidup orang Jawa. Seperti masyarakat Jawa itu harus sopan, mempunyai sifat kerukunan, anjuran untuk saling menyapa, rukun dengan tetangga dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak

³⁰I Ketut Susun (Kepala Dusun I), *Wawancara*, 15 Januari 2017.

³¹I Ketut Sutayana, Panandhite (Pemangku Agama Bali), *Wawancara*, 15 Januari.

³²I Ketut Sukana, Tokoh Adat, *Wawancara*, 19 Januari 2017.

boleh membeda-bedakan kayakinan maupun suku.³³ Falsafah hidup yang menuntun sikap sosial ini membentuk perilaku sosial masyarakat yang bisa hidup rukun dan berdampingan dengan dengan orang Bali, orang Jawa harus bisa menjadi *Wong Jowo Sing Njawani*. Artinya sebagai orang Jawa yang hidup berdampingan harus menghormati dan menganggap saudara terhadap orang lain yang berbeda, jangan sampai perbedaan Agama dan Suku menjadikan masyarakat Kampung Rama Utama saling bermusuhan.³⁴

Impelementasi tuntutan untuk selalu *Njawani* diatas juga membentuk sikap sosial yang adil, tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain dengan latar belakang perbedaan suku dan agama (seperti orang Bali). Maka tidak heran jika masyarakat etnik jawa disini ketika ada kegiatan selalu mengikut sertakan masyarakat Bali, itu merupakan bentuk cara kami masyarakat Jawa menganggap masyarakat Bali adalah saudara. Orang jawa harus bisa membuat masyarakat dari suku lain nyaman hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa. Maka dari hal itulah harus bisa menjadi masyarakat *Njowo Seng Njawani*.³⁵ Menurut seorang informan, masyarakat Jawa yang ada di kampung ini sangat memahami falsafah *Wong Njowo Sing Njawani*, hal ini antara lain dapat dilihat dari sikap menghargai, rasa persaudaraan yang kuat, rukun dengan masyarakat Bali, sehingga hampir tidak pernah di temukan keributan. Masyarakat kampung Rama Utama menjaga keharmonisan tersebut.³⁶

Falsafah dan norma sosial yang bersumber dari budaya lokal diatas realitasnya tidak terhenti semata-mata sebagai nilai budaya yang hanya dihayati tanpa wujud kelembagaan yang fungsional. Falsafah yang dihayati masyarakat Jawa di desa ini khususnya membentuk wujud budaya sosial yang fungsional dan melembaga (*institutionalized*). Dalam interaksi sosial antara masyarakat Jawa dan masyarakat Bali di kampung ini ditemukan beberapa lembaga (institusi) masyarakat yang menjadi wadah interaksi antara kedua kelompok masyarakat yang berbeda.

Pertama, Rewangan. *Rewangan* adalah kegiatan mengumpulkan tetangga agar dapat membantu salah satu warga yang sedang mempunyai hajat, biasanya dalam acara pernikahan, pembuatan rumah, syukuran, sunatan, dan lain-lain. Acara rewangan biasanya yang di undang adalah sanak saudara atau tetangga terdekat. Tradisi *rewangan* ini juga ada dalam masyarakat Kampung Rama Utama yang berlatar belakang masyarakat yang majemuk. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Ahmad Jumadi:

³³Tuyitno (Kepala Dusun II), *Wawancara*, 16 Januari 2017.

³⁴Ahmad Jumadi, Mudin, *Wawancara*, 20 Januari 2017.

³⁵Panto, *Wawancara*, 22 Januari 2017.

³⁶Gimo, Kepala Kampung, *Wawancara*, 16 Januari 2017.

Kalau kegiatan lingkungan misalnya rawangan ya mereka ikut serta rawangan, dalam rangka acara pernikahan sunatan, mbangun rumah , dan kegiatan lainnya. Kalau pas yang mempunyai hajatan itu orang Bali, ya mereka motong Babi tapi tempat masakanya di pisah, di bedakan tempat masak. Dan biasanya dalam kegiatan rawangan, orang Bali memanggil orang Islam untuk memasak.³⁷

Begitupun sebaliknya, ketika salah satu masyarakat Jawa yang mempunyai hajatan, maka masyarakat yang dekat dengan tempat hajatan pasti akan di undang untuk *rawangan*. Biasanya dalam *rawangan* yang dilakukan masyarakat Jawa memotong sapi untuk dimakan bersama. Ketika yang ikut *rawangan* masyarakat Bali, masyarakat Jawa menyediakan hidangan lainnya. Masyarakat Jawa sudah mengetahui bahwa Masyarakat Bali dilarang memakan daging Sapi.³⁸ Rawangan juga menjadi wadah untuk mengekspresikan sikap saling bertenggang rasa antar kelompok, seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung. Dalam kegiatan *rawangan* yang ada di Kampung Rama Utama, masyarakat sudah memahami apa saja yang menjadi pantangan baik itu pantangan bagi masyarakat Jawa maupun Bali. masyarakat Bali sudah memahami bahwa masyarakat Jawa dan beragama Islam tidak dibolehkan memakan babi, maka ketika kegiatan *rawangan*, masyarakat Bali menyediakan makanan yang tidak diharamkan oleh masyarakat Jawa yang beragama Islam, seperti daging ayam. Begitupun sebaliknya, masyarakat Jawa pun mengetahui bahwa masyarakat Bali tidak memakan daging sapi, maka disediakan pula hidangan yang lain.³⁹

Kedua, Layatan. *Layatan* adalah sebutan masyarakat kampung Rama Utama, dimana ketika ada yang meninggal mereka saling berkunjung atau biasanya bagi orang Islam disebut dengan ta'ziah, baik itu ketika salah satu masyarakat suku Jawa yang meninggal ataupun dari Suku Bali yang meninggal.⁴⁰ Ibu Mardiyah menjelaskan bahwa apabila ada orang Bali yang meninggal, warga sekitar selalu menunjukkan rasa persaudaraan untuk berbelasungkawa dengan ngelayat ke rumah keluarga yang berduka cita. Hati nurani masyarakat khususnya orang Islam mendoakan agar yang meninggal supaya dapat diterima di sisi Tuhan yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika orang Jawa dan beragama Islam meninggal, orang Bali pun ngelayat dan ikut merasakan duka.⁴¹ Tradisi ngelayat (*ta'ziyah*) agaknya juga dilakukan tanpa sekat dan pembedaan antara orang Bali yang beradagama Hindu dan orang

³⁷Ahmad Jumadi, Mudin, *Wawancara*, 20 Januari 2017.

³⁸Tukirin, *Wawancara*, 21 Januari 2017.

³⁹Gimo, Kepala Kampung, *Wawancara*, 16 Januari 2017.

⁴⁰Ahmad Jumadi, Mudin, *Wawancara*, 20 Januari 2017.

⁴¹Mardiyah, Ketua PKK , *wawancara*, 17 Januari 2017.

Jawa yang beragama Islam, sehingga seperti ungkapan Bapak I Ketut Sukana. Tidak pernah ada perbedaan suku dan agama yang menghalangi tradisi *ngelayat*, karena masyarakat Jawa dan Bali hidup berdampingan dan merasakan sama-sama menjadi transmigran.⁴²

Disini kalau ada masyarakat Bali yang meninggal, masyarakat Jawa di sekitar kami ikut berduka cita, mereka *ngelayat* ke rumah yang sedang mengalami kesedihan. Biasanya orang Bali yang meninggal itu di diamkan di rumah selama tujuh hari kadang juga lebih, nah masyarakat Jawa dan beragama Islam datang tiap hari sampai acara penguburan dilakukan atau kalau kami masyarakat Bali mayat itu di bakar (*ngaben*). Begitupun sebaliknya, kalau yang meninggal itu masyarakat Jawa dan beragama Islam, kami ya datang *ngelayat* sampai prosesi dikuburkan. Tapi kami masyarakat Bali tidak ikut prosesi yang berlatar belakang agama, seperti sholat jenazah.⁴³ Seperti penjelasan seorang tokoh desa bahwa ketika ada salah satu masyarakat Kampung Rama Utama yang meninggal, baik itu orang Jawa atau orang Bali, ya pada *ngelayat* untuk mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang sedang berduka cita. Bahkan dalam acara *Ngaben* masyarakat Jawa juga ikut menunjukkan simpati kepada keluarga yang berduka. Apalagi dalam posisinya sebagai kepala Kampung dia selalu mengikuti acara-acara yang ada, kecuali ada kegiatan yang itu sifatnya khusus (ritual keagamaan Hindu), begitupun sebaliknya.⁴⁴

Disamping realitas kelembagaan sosial diatas, kedua kelompok masyarakat di kampung ini juga secara bersama-sama menjaga tradisi gotong royong, yang memang sudah menjadi tradisi yang menyatu dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dalam posisi mereka sebagai penduduk Kampung Rama Utama yang nota-bene sebagai wilayah transmigrasi yang berasal dari Jawa dan Bali. Perasaan senasib menjadi salah satu faktor pendorong mereka mengupayakan agar kehidupan yang dijalain dapat seimbang, rukun serta saling membantu. Kenyataan sosial yang bisa disaksikan pada masyarakat desa ini, bahwa kewajiban untuk bergotong royong, memiliki semangat saling membantu menjadi energi sosial dalam membangun harmonitas dan integrasi masyarakat. Dalam banyak kegiatan tradisi bergotong royong masih sangat melekat seperti dalam membuat rumah tinggal.⁴⁵ Menurut informan lain, Tradisi bergotong royong yang sudah melembaga ini, jika ada yang melanggar (tidak melaksanakannya) maka hukum adat setempat akan memberlakukan sanksi berupa denda (terutama dalam hukum adat

⁴²Ketut Susun, Tokoh Adat Bali, *wawancara*, 16 Januari 2017.

⁴³I Ketut Sutayana, Tokoh Adat, *Wawancara*, 22 Januari 2017.

⁴⁴Gimo, Kepala Kampung, *Wawancara*, 16 Januari 2017.

⁴⁵Gimo, Kepala Kampung, *Wawancara*, 16 Januari 2017.

masyarakat Bali), sedangkan masyarakat Jawa menanggapinya hanya dengan diminta kesadaran. Karena Masyarakat Jawa dan Bali hidup berdampingan, maka peraturan itu pun diikuti oleh masyarakat setempat.⁴⁶

Bergotong royong adalah modal sosial dalam membangun harmonitas dalam masyarakat. Namun gotong royong di tempat ini menjadi norma sosial yang menjadi kesepakatan masyarakat setempat yang bersifat mengikat (memaksa). Sanksi bagi pelanggar norma diberlakukan secara adil dan objektif, tanpa memandang pihak mana yang melakukan pelanggaran, baik orang Jawa maupun orang Bali, sehingga dengan begitu maka tidak ada keberatan dari salah satu pihak, dengan begitu maka kerukunan masyarakat bisa terjaga dengan baik.⁴⁷ Norma-norma lokal yang disepakati secara bersama-sama oleh kedua komunitas ini menjadi faktor yang sangat kuat dalam membangun integrasi masyarakat yang berbeda suku dan berbeda agama. Sehingga selama ini belum pernah terjadi peristiwa bentrok, perselisihan dan konflik antar suku maupun antar agama di tempat ini. Kondisi ini diyakini oleh masyarakat sebagai buah dari kearifan yang dibentuk dan disepakati bersama oleh kedua kelompok masyarakat.⁴⁸

Pengelolaan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat desa ini dirasakan sebagai tanggung jawab bersama kedua kelompok komunitas, dengan selalu berpegang kepada prinsip persaudaraan, toleransi dan solidaritas sosial budaya, sehingga dalam prakteknya, segala sesuatu menyangkut kepentingan bersama dilakukan dan diputuskan secara musyawarah yang melibatkan kedua pihak⁴⁹ Bahkan dalam penentuan pemimpin desa (kepala desa) pihak masyarakat Jawa yang merupakan mayoritas terlebih dahulu menawarkan kepada masyarakat Bali untuk menjadi pemimpin desa, namun masyarakat Bali selalu mempersilahkan orang Jawa untuk menjadi kepala desa. Orang Jawa dalam hal ini juga dengan berbesar hati membagi kekuasaan, memberikan jabatan (kepala dusun) kadus kepada orang Bali. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami ingin Kampung Rama Utama tetap menjadi kampung dengan suasana aman, sejahtera dan rukun.⁵⁰ Semangat toleransi dan saling memahami memang berkembang dengan baik sebagai salah satu pranata dalam menjaga dan mengembangkan integrasi kedua komunitas yang berbeda agama dan berbeda suku. Semangat toleransi dimaksud seperti dapat ditangkap dalam ungkapan salah seorang informan bahwa kalau ada nasi sepiring kita bagi

⁴⁶Tuyitno, *wawancara*, 16 Januari 2017.

⁴⁷Gimo, Kepala Kampung, 16 Januari 2017.

⁴⁸Gimo, Kepala Kampung, *Wawancara*, 16 Januari 2017.

⁴⁹Gimo, Kepala kampung, *wawancara*, 16 Januari 2017

⁵⁰Mardiyah, Ketua PKK, *Wawancara*, 22 Januari 2017.

makan bareng-bareng. Disini kami orang Hindu sudah tahu bahwa orang Muslim tidak boleh makan makanan tertentu seperti babi. Ketua Adat disini menganjurkan agar kita tidak menjerumuskan, misalnya kita ngasih makanan yang diharamkan maka kita yang dosa, bukan orang yang makan yang berdosa.⁵¹ Komunitas Jawa yang muslim juga menunjukkan keinginan dan upaya untuk menjaga perasaan saudaranya orang Bali, sehingga dalam hal menghadapi hidangan misalnya, jika berhadapan dengan hidangan yang meragukan maka mereka menghindar, namun memilih makanan yang jelas kehalalannya (seperti kue) untuk dimakan, demi menjaga perasaan orang Bali yang sudah dianggap sebagai bagian dari masyarakat desa. Begitu juga sebaliknya.⁵²

Suasana kerukunan yang ada disamping dibentuk melalui sikap dan prilaku sosial sebagai implemmentasi dari nilai-nilai kearifan yang berkembang pada kedua belah pihak, juga diupayakan dengan mengkreasi kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menjalin dan memperkuat hubungan sosial kedua belah pihak, bahkan hingga generasi muda. Seperti disampaikan oleh salah seorang informan bahwa momentum-momentum tertentu dijadikan sebagai kesempatan untuk memperkuat tali ikatan persaudaraan antar kelompok generasi muda, seperti dalam acara memperingati hari ulang tahun Kampung, peringatan hari kemerdekaan, kegiatan olahraga, serta kegiatan lainnya.⁵³ Melalui kegiatan ronda malam untuk menjaga keamanan kampung semua anggota masyarakat diberikan ruang partisipasi dan tanggung jawab untuk kepentingan semua warga.⁵⁴ Dengan berbagai kegiatan dan strategi yang dirancang dan disepakati bersama oleh masyarakat, maka perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat Kampung Rama Utama, seolah lebur begitu saja dan efektif dalam membangun dan menjaga kerukunan dan persatuan yang telah terjalin sejak lama. Masyarakat Jawa yang mayoritas Islam, meskipun merasa memiliki kewajiban untuk menjalankan dan menegakkan tuntunan syari'at agama yang dipeluknya, seperti haram untuk mengkonsumsi daging babi dan anjing bahkan merasa risih untuk menjadikan hewan dimaksud sebagai peliharaan. Sementara bagi masyarakat Bali yang ada di kampung Rama Utama memelihara anjing dan babi. Namun hal ini tidak lantas menimbulkan konflik. Masyarakat Bali dari awal sudah mempelajari apa saja yang menjadi pantangan bagi orang Jawa yang beragama islam, begitupun sebaliknya. Di Kampung Rama Utama sudah ada kesepakatan antara masyarakat Jawa dengan Bali, apabila ada hewan

⁵¹I Ketut Susun, *Wawancara*, 16 Januari 2017.

⁵²Sumiyati, Ketua Muslimat, *wawancara*, 18 januari 2017

⁵³I Ketut Susun, *Wawancara*, 16 januari 2017.

⁵⁴Panto, *wawancara*, 16 januari 2017.

peliharaan yakni Babi keluar dari kandang kemudian masuk ke rumah orang Jawa, maka diperbolehkan hewan babi tersebut dibunuh.⁵⁵ Bagi masyarakat Bali menganggap itu salah orang Bali Karena hewan tersebut lepas, apalagi hewan itu adalah Babi.⁵⁶

Toleransi, sikap saling menghargai serta solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat Kampung Rama Utama inilah yang membentuk persatuan dan kesatuan. Kondisi psiko-sosial pada kedua belah pihak yang merasa sebagai saudara, sebagai bagian dari masyarakat yang satu, membentuk kesatuan sosial ditengah keragaman yang ada, dan menjadi faktor pencegahan konflik akibat perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan budaya serta kepercayaan tidak menghalangi masyarakat setempat dalam mencapai kerukunan. Masyarakat Bali adalah masyarakat minoritas, akan tetapi masyarakat yang beragama Islam menghargai, merasa senasib karena sama-sama transmigrasi.⁵⁷

Realitas sosial yang ada dalam kehidupan kedua komunitas ini merupakan wujud kreasi budaya lokal (kearifan lokal) yang mereka miliki, kedua kelompok masyarakat ini dapat melakukan adaptasi unsur-unsur yang berbeda untuk kemudian menghasilkan keserasian. Secara teoritik Integrasi sosial akan terwujud apabila masyarakat mampu mengendalikan prasangka yang ada di masyarakat sehingga tidak terjadi konflik, dominasi, tidak banyak sistem yang tidak saling melengkapi, dan tumbuh integrasi tanpa paksaan. Untuk mewujudkan integrasi masyarakat pada masyarakat majemuk dilakukan dengan mengatasi dan mengurangi prasangka-prasangka (*prejudices*) yang kemungkinan akan berkembang. Dengan berbasis kearifan lokal yang seperti ini masyarakat suku Jawa dengan tulus membagi kekuasaan politik (dalam pemerintahan desa) kepada masyarakat suku Bali yang direspon dengan pandangan politik yang berbasis proporsionalitas karena mereka menyadari bahwa sebagai kelompok penduduk yang minoritas sehingga tidak sepatasnya memimpin kelompok masyarakat.

Dalam teori sosiologi integrasisosial berarti proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Tercapainya integrasi sosial masyarakat Jawa-Bali yang ada di desa ini karena beberapa faktor seperti sikap toleran terhadap perbedaan, baik yang dimiliki dan diimplementasikan oleh masyarakat Jawa (yang Islam) maupun masyarakat Bali (yang Hindu). Sikap dan perilaku toleran dibentuk oleh kesediaan untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan

⁵⁵Gimo, Kepala Kampung, *Wawancara*, 16 Januari 2017.

⁵⁶Ahmad Jumadi, Mudin, *Wawancara*, 22 Januari 2017.

⁵⁷I Ketut Suyana, Pandhite (pemangku Agama), *Wawancara*, 15 Januari 2017.

budaya masing-masing, dan mengejawantahkan sikap dan perilaku budaya yang beradaptasi dengan kedua kebudayaan yang ada, tanpa harus meninggalkan substansi budayanya sendiri. Dengan kata lain bahwa kesediaan kedua belah pihak yang memiliki latar belakang perbedaan budaya untuk melakukan penyesuaian budaya menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan integrasi sosial. Di samping itu dalam interaksi kedua kelompok masyarakat di desa ini juga nampak jelas adanya solidaritas yang terbentuk oleh kesediaan untuk saling memahami budaya dan kepentingan masing-masing. Baik komunitas Bali maupun komunitas Jawa berusaha memahami makna di balik tindakan budaya yang dianut kelompok lain, dan berusaha untuk mewujudkan tindakan sosial yang beradaptasi dengan makna atau nilai yang dianut oleh masing-masing kelompok. Hal ini menurut Max Weber sebagaimana dalam teori tindakan sosial yang diintoduserinya, memandang begitu pentingnya tindakan memahami (*verstehen*) makna tindakan dibalik tindakan kongkrit yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data pembahasan terhadap data yang ditemukan dapat kemukakan beberapa kesimpulan; *Pertama*, bahwa mengadapi realitas perbedaan dan keragaman terutama keragaman suku dan agama, maka masyarakat dituntut untuk melahirkan inovasi budaya dan kreatifitas dalam melakukan aktualisasi dan adaptasi ajaran yang memungkinkan masyarakat (majemuk) untuk tetap berintegritas antara satu dengan yang lain dalam suasana harmonis, tanpa merasa disekat oleh perbedaan-perbedaan budaya dan agama yang menonjol. *Kedua*, bahwa kreatifitas dan kearifan masyarakat dalam melakukan adaptasi nilai-nilai budaya dan agamanya dalam suasana sosial yang plural (dari sisi agama dan budaya) menjadi faktor determinan dalam membangun relasi sosial yang harmonis antara dua komunitas yang dilatari perbedaan budaya dan agama, meskipun kreatifitas dan kearifan dimaksud mengandung resiko terhadap keutuhan ajaran agama (terutama) yang dianut. Ajaran agama dan budaya, yang implementasi ajaran sosialnya dilakukan di tengah masyarakat yang majemuk memerlukan kearifan dalam implementasinya, sehingga perbedaan antara komunitas yang ada tidak dirasakan mengganggu relasi dan interaksi antara komunitas yang berbeda. Kesediaan untuk melakukan adaptasi pola pelaksanaan ajaran agama dan budaya yang berbeda ditengah kemajemukan masyarakat, merupakan wujud dari kemampuan memahami makna (*verstehen*) dari masing-masing ajaran agama dan budaya yang dianut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : PT AdiMahasatya, 2003
- Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta : PT LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2005
- Alpha Amirrachman, Ed., *Revitalisasi Kearifan Lokal : Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*, Jakarta : ICIP, 2007
- Aprilia thelesia, et. Al. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Asep Syaefullah, *Merukunkan Umat Beragama Studi Pemikiran Tarmizi Taber tentang Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta : Khazanah Ilmu, 2007
- Basrowi, *Pengantar Sosial Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Modern*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, PT Gramedia Jakarta, 1988
- Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta : Penerbit KANISIUS, 1989
- Kaare Svalastago, *Social Differentiation*, Terj. Alimandanu, Jakarta: PT Bina Aksara, 1989
- Koentjaraningrat, *Sejarah antropologi I*, Universitas Indonesia (UI-Press), _____, *Manusiadan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Jambatan, 1976
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta : PT Nusantara lestari Ceriaprata. 2009
- Soleman B. Taneko, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: CV Fajar Agung, 1994
- Suminar.dkk, *Integrasi dan Disintegrasi Dalam Prespektif Budaya*, Jakarta; Bupara Nugraha, 2003
- Suwarno, Abdul Syani, Pairul Syah, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2013.
- Suwarsono, Alvin Y. SO, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: PTPustaka LP3ES Indonesia, 2006 Ed.
- Hasbullah, "Rewang: Kearifan lokal Dalam Membangun Solidaritas dan Integrasi Sosial Masyarakat di Desa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis". Vol. 9 No.2 Juli-Desember 2012, (On-Line), tersedia di: <http://download.portalgaruda.org/article.is>
- Eka Hendry Ar, dkk, " *Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multi Etnik*". Jurnal Walisongo, Vol.21 No.1 (Mei 2013).